

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Post

Jumat
15 Desember 2023

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Komisi Informasi Beri Penghargaan Terbaik Ketiga se Sultra Terkait Keterbukaan Informasi Publik Pada Kota Baubau



Kadis Kominfo Baubau Andi Hamzah Machmud mewakili Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi menerima piagam penghargaan terbaik ketiga se Sultra terkait keterbukaan informasi publik

Laporan: Ardi

KENDARI, BP-Monitoring dan evaluasi terhadap 17 PPID utama Kabupaten/Kota se-Sultra sebagai badan publik oleh Komisi Informasi (KI) Sultra, menempatkan Kota Baubau di posisi ke-3.

Pengumuman itu disampaikan dalam malam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

Lanjutan ke Hal: 7

Lepidak-Sultra Minta KPK Periksa Inspektorat
Butur Karena Dinilai Tidak Patuh dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik



Laporan: Ardi

BURANGA, DT-Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti

Korupsi Sulawesi Tenggara (Lepidak-Sultra) menyebut Inspektorat Kabupaten Buton Utara diduga tidak patuh dengan

undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Lanjutan ke Hal: 7

Baubau Optimis Tahun 2024
Raih Terbaik Soal Keterbukaan
Informasi Publik di Sultra



Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi

Laporan: Ardi

BAUBAU, DT-Penyajian dan akselerasi informasi yang terbuka dan

meluas melalui media resmi pemerintah termasuk penggunaan media

Lanjutan ke Hal: 7

Kalapas Herman Mulawarman Jamin
Narapidana di Lapas Kelas II A
Baubau Dipastikan Mendapatkan
Hak-haknya Selama Berada di Rutan



Herman Mulawarman

Pewarta: Alyakin

BAUBAU, BP - Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2023. Kepala Lapas Kelas II A Baubau, Herman Mulawarman me-

Lanjutan ke Hal: 7

Dapat Persetujuan Pj Gubernur ABR, Cold
Storage TPI Wameo Baubau Mulai Diaktifkan
Kembali Setelah 2 Tahun Tak Difungsikan



Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP-Setelah vakum selama kurang lebih dua tahun, akhirnya

cold storage atau tempat penyimpanan ikan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Wameo kembali diaktifkan oleh Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman

Lanjutan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



Komisi Informasi Beri Penghargaan Terbaik Ketiga se Sultra Terkait Keterbukaan Informasi PublikPada Kota Baubau

yang diselenggarakan Komisi Informasi Sultra di Kendari Senin malam (11/12/2023).

Kadis Kominfo Kota Baubau HAndi Hamzah Machmud, S.Sos, M.Si mewakili Pj Walikota Baubau usai menerima penghargaan merasa bersyukur atas prestasi yang dicapai PPID utama Kota Baubau pada

malam penganugerahan Keterbukaan informasi publik.

Diharapkan dengan apresiasi ini memotivasi untuk semakin maju dan terbuka dalam memberikan informasi publik.

Semakin transparan dan akuntabel dalam mberikan pelayanan dan keterbukaan pub-

lik lebih khusus kepada PPID pelaksana sebagai ujung tombak OPD Pemkot Baubau Tentu ke depan akan dilakukan move ke seluruh PPID pelaksana guna berkolaborasi menjadikan Kota Baubau sebagai kota yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada ma-

syarakat.

Malam penganugerahan Keterbukaan informasi publik dibuka Sekda Provinsi Sultra Dr Asrun Lio, M.Hum mewakili Pj Gubernur Sultra. Turut dihadiri wakil ketua komisi Informasi RI, perwakilan bupati/Wali Kota se Sultra, PPID utama se Sultra.(*)

Kalapas Herman Mulawarman Jamin Narapidana di Lapas Kelas II A Baubau Dipastikan Mendapatkan Hak-haknya Selama Berada di Rutan

mastikan Narapidana mendapatkan hak-hak seperti hak mendapatkan remisi, hak integrasi, asimilasi, hak untuk mendapatkan informasi dengan menyediakan ruang perpustakaan, hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga.

Demikian diungkapkan Kepala Lapas Kelas II A Baubau, Herman Mulawarman ketika dikonfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (11/12/2023).

“Pesanan dari Kemenkumham RI, UPT Masyarakat selalu memberikan pelayanan terbaik dengan me-

lihat hak hak mereka selama menjalani, dan tidak menggunakan kekerasan, karena tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali memberikan pelayanan dengan hati,” katanya.

Menurutnya, perlakuan petugas terhadap narapidana berbeda dengan zaman penjara dulu, Ham mereka betul-betul dihilangkan, namun setelah peralihan sistim penjara, sistim permasyarakatan sehingga berubah total. “Kita terus berupaya agar petugas tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap warga binaan. Mereka didalam semua sep-

erti bersodara, jadi kita upayakan ini, rumah kita, jaga jangan sampai ada perselisihan, Adapun ada perselisihan kita selesaikan secara baik baik sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM.” katanya.

Olehnya itu, pihaknya intens melakukan briefing, sosialisasi dengan memperingatkan para petugas tentang hak dan kewajibannya agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

“Terus kita sering shering, komunikasi dengan warga binaan, mengingatkan karena yang masuk semua disini bermasalah, Pastinya tekanan psikologis para

tahanan , jadi diantisipasi jangan sampai ada perselisihan.” katanya.

Disamping itu, Lapas Kelas II A Baubau di bawah kepemimpinan Herman Mulawarman terus memberikan pelayanan secara maksimal terhadap para pengunjung. Bahkan pengunjung penyandang disabilitas mendapatkan ruang khusus bila ingin bertemu keluarganya.

“Kita melayani pengunjung dengan baik. Kita siapkan juga pengunjung disabilitas, bisa berinteraksi dengan keluarganya,” ucapnya.(*)

Lepidak-Sultra Minta KPK Periksa Inspektorat Butur Karena Dinilai Tidak Patuh dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Pasalnya, Inspektorat Buton Utara tidak pernah melakukan ekspos hasil audit para kepala Desa, Lurah maupun Kepala Sekolah di Buton Utara.

“Jika kita mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sudah seharusnya pihak Inspektorat Kabupaten Buton Utara untuk membuka diri bagi setiap orang atau masyarakat yang ingin mengetahui setiap perkembangan hasil pemeriksaan tiap tahun baik hasil pemeriksaan desa, hasil pemeriksaan kelurahan maupun hasil pemeriksaan kecamatan secara umum di kabupaten

Buton Utara, selama memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak Inspektorat itu sendiri”, kata Ketua Lapidak-Sultra La Ode Harmawan saat konferensi Pers di salah satu Warkop di Butur Senin, (11/11/2024).

Olehnya itu, Mawan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Inspektorat Buton Utara.

“Saya mendesak KPK RI untuk memeriksa Inspektorat kabupaten Buton Utara karena itu merupakan fungsi dan bagian tugas dari KPK “, tegas Mawan.

Mawan mengungkap, Badan pemeriksaan Keuangan (BPK)

saja memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tiap tahunnya. Kok sekelas Inspektorat Kabupaten Buton Utara sangat susah untuk memberikan hasil pemeriksaan tiap tahunnya.

“Ada apa dengan Inspektorat kabupaten Buton Utara? Ada rahasia apa sebenarnya, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Butur, jangan - jangan ada dugaan main mata antara terperiksa dan pemeriksa Wallahu alam. “,ucap Mawan

Mawan, seorang advokat muda jebolan dari organisasi advokat (OA) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia

(PPKHI) menyayangkan, sikap Inspektorat kabupaten Buton Utara yang sampai saat ini sangat susah dan tertutup untuk memberikan informasi terkait hasil temuan pemeriksaan baik desa, kelurahan maupun kecamatan secara keseluruhan di kabupaten Buton Utara.

“Sangat aneh dengan Inspektorat Kabupaten Buton Utara”, tuturnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Inspektorat Butur belum memberikan tanggapan. Irban Investigasi Erna saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya belum membalas pesan yang dikirim media ini, hanya dibaca.(*)

Dapat Persetujuan Pj Gubernur ABR, Cold Storage TPI Wameo Baubau Mulai Diaktifkan Kembali Setelah 2 Tahun Tak Difungsikan

Manafi, SP, M.Si Selasa (12/12/2023).

Pengaktifan kembali cold storage supaya nelayan Baubau bisa menangkap ikan dan lebihnya disimpan dan bisa dijual untuk tambahan pemasukan. Kemudian masyarakat juga tidak sulit mencari ikan dengan harga yang tinggi dari tempat lain, sementara yang menangkap dari wilayah Baubau.

“Alhamdulillah pak Gubernur saya laporkan malam saat itu juga beliau langsung whatsapp Sekjen Kementerian Kelautan saat itu juga, mohon arahan dan kita butuh dukungan kita, saat itu juga pak Sekjen Kementerian Kelautan langsung whatsapp menyampaikan ini akan menjadi atensi saya,” kata Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi.

seminggu setelah itu, lanjutnya, di Kendari Pj Walikota lapor permasalahan, “Solusinya hanya satu ada surat yang bisa di keluarkan provinsi supaya ini kita bisa pakai karena kalau kita proses pelimpahan asetnya butuh proses akhirnya Alhamdulillah minggu lalu pas mau masuk Desember keluarlah surat provinsi untuk supaya ini kita bisa gunakan kembali atau diaktifkan. Kenapa ini harus diceritakan karena ini bukan hanya saya yang kerjakan tapi ada kadis kelautan, ada provinsi dan yang paling utama adalah dukungan dari bapak ibu di sini,”ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini berpesan karena sudah dikasih amanah punya kekuatan tidak mungkin cukup kalau tidak bersama-sama. Sehingga, pihaknya selalu menyampaikan bekerja bersama.

Kemudian dikarenakan cold storage sudah tidak lama digunakan dan diaktifkan maka pasti ada alat yang rusak. Apalagi banyak yang terlihat sudah patah sehingga sudah diambil langkah untuk ini. Bahkan minggu lalu, sudah dapat informasi dari BNPB pusat sudah masuk ke Sulawesi Tenggara untuk melakukan verifikasi karena ada beberapa bangunan-bangunan pantai dan minta supaya TPI Wameo diperbaiki dermaganya dengan talutnya supaya tidak ada hambatan dan bisa optimal memanfaatkan TPI Wameo.

Dr Muh Rasman mengetahui persis bahwa hampir semua sumber daya laut itu dapat dimanfaatkan, bukan cuma ikan ada energi di dalamnya, ada mineral, bahkan jasanya besar, jasa kelautan seperti wisata, dijaga, dinikmati, ada pendapatan. Artinya bahwa di laut banyak manfaat, sumber daya ikan itu karena ikan itu akan dikonsumsi untuk kebutuhan dasar.

Disamping itu, Ikan itu banyak penggunaannya sehingga kalau orang-orang makan ikannya banyak itu lebih tahan ngantuk dari pada yang sedikit

makan ikan sebab kandungan omega 3 nya tinggi.

Lebih lanjut dijelaskan, karena ikan konsumsi rutin dan ini juga menjadi mata pencaharian maka sudah seharusnya wilayah-wilayah kepulauan itu fasilitas perikanannya harus kuat. Dan Baubau sejak akhir tahun lalu sampai 2 bulan lalu itu masuk dalam 10 besar inflasinya tertinggi, dan salah satu penyebab inflasi daya beli, kesejahteraan , komunitas yang menyebabkan Baubau tinggi inflasi adalah ikan. Padahal ikan di Baubau banyak tapi penyebab kesejahteraan menurun.

Oleh karena itu sejak hampir 3 bulan lalu akhir bulan September sejak di lantik sebagai Pj Wali Kota Baubau dan setelah evaluasi bulan pertama penyebabnya ternyata memang salah satunya karena tidak mempunyai penyimpanan ikan.

“Itulah penyebab utamanya, kita punya banyak ikan dan akhirnya ikan yang kita tangkap itu dibawa ke wilayah lain, harga ikan kita itu pasti tinggi, karena ada bahan bakar yang dipakai itulah yang menyebabkan. Maka karena kewenangan, saya akhirnya mengambil langkah saya harus lapor ke Pak Gubernur bagaimana solusinya dan gubernur menyikapinya sehingga cold Storage TPI Wameo kembali diaktifkan,” urainya.(*)

sebagai badan Publik di Kota Baubau berkeajiban memberitakan aktivitasnya ke publik, sasarannya jelas, agar masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah. ini modal besar menjadikan Kota Baubau sebagai daerah dengan keterbukaan informasi publik terbaik di tahun depan di Sultra,â€ imbuh H. Andi Hamzah.

Berkaitan dengan itu, Kota Baubau juga akan membenahi keorganisasian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana yang berada di semua Badan Publik di Kota Baubau. sebab regulasinya membutuhkan Perangkat daerah sebagai Badan Publik wajib menyajikan informasi kepada seluruh masyarakat, mulai dari informasi dalam bentuk berita, pengumu-

man, sampai dengan informasi agenda kegiatan masing-masing perangkat daerah.

Secara teknis, hal hal yang dikelola oleh PPID di masing-masing OPD adalah, tersedianya informasi setiap saat, iinformasi berkala dan informasi serta merta yang dapat diakses publik secara mudah, murah dan bertanggung jawab. Wujudnya dipublikasi melalui website resmi, dan sebagainya, sebagaimana amanah dari pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Andi Hamzah, bila semua OPD telah “terbukaâ€™ dan menyediakan informasi tersebut, apalagi telah didorong langsung oleh Pj Wali Kota, maka Baubau akan menjadi Kota Informatif dan

hal ini sangat baik bagi masyarakat dan pemerintah dalam penciptaan iklim demokratis yang sehat dan bertanggungjawab.

â€œKota Baubau sudah di Tiga Besar level terbaik, untuk menjadi yang paling terbaik di Sultra tahun depan kami sangat optimis, sebab Pak Wali Kota secara pribadi maupun kelembagaan telah menjadikan informasi sebagai kewajiban bagi jajarannya untuk terus dimasifkan, itu merupakan modal besar mewujudkan Kota Baubau sebagai Kota Informatif, dan sebagai daerah dengan akselerasi informasi publik yang terbuka, demokratis dan bertanggungjawab. Kami sangat mengapresiasi kepemimpinan informatif dari Pj Wali Kota,â€ tambah Andi Hamzah. (*)

Baubau Optimis Tahun 2024 Raih Terbaik Soal Keterbukaan Informasi Publik di Sultra

sosial secara massif, menjadikan Kota Baubau memperoleh predikat terbaik di Sulawesi Tenggara bersama Kabupaten Kolaka dan kabupaten Bombana yang secara ranking berada di urutan pertama dan kedua, hasil penilaian Komisi Informasi (KI) Sultra.

â€œTiga besar, berarti Kota Baubau berada pada level terbaik di

Sulawesi Tenggara. Itu berarti tahun depan harus menjadi yang paling terbaik dari 17 Kabupaten/Kota di Sultra. Kami sangat optimis meraihnyaâ€ , ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau, H. Andi Hamzah Machmud, S.Sos, M.Si dalam rilisnya Selasa sore ini. (12/12).

Optimisme itu mun-

cul tidak semata karena target predikat, tetapi didorong oleh semangat dan kinerja kepemimpinan Pj. Wali Kota Baubau Dr. Muh. Rasman Manafi, SP, M.Si yang menjadikan sebaran informasi pemerintahan ke publik sebagai perhatian utamanya. Bahkan untuk percepatan pelayanan Dr.Rasman membuka akses langsung melalui

linktree, yang menyatukan facebook, intagram dan twitter, sebagai saluran informasi warga langsung ke Pj. Wali Kota.

â€œSejak awal pemerintahan Dr. Rasman sebagai Pj. Wali Kota Baubau, gebrakan penyaluran dan penyebaran informasi secara terbuka dan massif terus dilakukan hingga sekarang. OPD-OPD

Mega Titip Pesan ke Ganjar Jelang Debat Malam Pertama



Pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Debat Pertama Capres 2024.

Laporan: Hasim

JAKARTA-- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kepada capres Ganjar Pranowo untuk debat malam ini, Selasa (12/12).

Hasto menyebut Mega berpesan agar Ganjar berbicara dengan menggunakan mata hati. Selain itu, penjelasan dalam debat juga harus jernih. Menurut Mega, kata Hasto, hal itu yang dibutuhkan oleh rakyat.

Elektabilitas 3 Paslon dari Berbagai Survei Jelang Debat Perdana

Survei Litbang Kompas: PSI dan 8 Partai Lainnya Tak Lolos DPR

Debat Capres, Prabowo-Gibran Berangkat Bersama ke KPU dari Kertanegara

“Ya ibu berpesan ya, berbicara dengan mata hati dan juga kesadaran alam pikir yang jernih, karena itu yang dibutuhkan oleh rakyat,” kata Hasti di depan Kantor KPU, Jakarta.

Hasto juga mengatakan Mega berpesan supaya Ganjar

bicara apa adanya. Sebab, tema debat malam ini berkaitan dengan komitmen pasangan Ganjar-Mahfud.

Adapun tema yang akan dibahas malam ini meliputi Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

“Debat ini menyampaikan sesuatu hal yang asli, yang terkait dengan komitmen pak ganjar dan prof Mahfud,” ucapnya.

Hasto pun optimis Ganjar siap untuk menjalani debat malam ini. Sebab, tema yang akan dibahas juga sesuai dengan kompetensi Ganjar dan Mahfud.

“Tentu saja pak Ganjar dan Prof Mahfud MD karena ini berkaitan dengan kompetensi kepemimpinan beliau Ganjar dan Pak Mahfud telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya,” ucap dia.

Debat capres pertama akan digelar hari ini. Rencananya, KPU akan menggelar 5 kali debat.

Berikut rincian-nya:

- Debat I (Selasa, 12 Desember 2023)

Tema: Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga (capres).

- Debat II (Jumat, 22 Desember 2023)

Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan perkotaan. (Cawapres)

- Debat III (Minggu, 7 Januari 2024)

Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik. (Capres)

- Debat IV (Minggu, 21 Januari 2024)

Pembangunan Berkelanjutan, SDA, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria Masyarakat Adat dan desa. (Cawapres)

- Debat V (Minggu, 4 Februari 2024)

Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, SDM, dan Inklusi. (Capres). (*)

Gibran Usai Dianggap Kompromi Penonton saat Debat: Saya Mohon Maaf



Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming minta maaf jika tindakannya keliru di acara debat pertama Pilpres 2024 lalu

Laporan: Hadi

SOLO -- Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka minta maaf atas tindakannya di acara debat kandidat Pilpres 2024 pada Selasa lalu (12/12).

Cawapres yang masih aktif menjabat sebagai Wali Kota Solo itu mengaku menerima teguran dari banyak pihak. Ia meminta maaf jika tindakannya dianggap salah.

“Ya semua teguran, evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (14/12).

Gibran tak menjawab lebih jauh mengenai kejadian tersebut.

Termasuk saat ditanya apakah yang memicunya melakukan aksi tersebut.

Aksi Gibran di debat perdana Pilpres 2024 menjadi sorotan ketika mengompori pendukungnya di lokasi acara.

Bermula saat capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menanyakan perasaan Prabowo Subianto soal pelanggaran etik berat hakim Mahkamah

Konstitusi dalam menguji perkara batas usia capres-cawapres.

Prabowo kemudian menjawab tidak ada masalah hukum dalam putusan MK tersebut. Ia pun menganggap permasalahan etika di Majelis Kehormatan MK (MKMK) sudah selesai usai Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK.

Gibran pun men-

dadak berdiri dan mengayunkan tangan dari bawah ke atas beberapa kali seperti sedang memancing emosi pendukung.

Aksi tersebut berlangsung singkat karena Gibran segera ditarik oleh salah satu anggota timnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) lalu mengomentari. Ketua KPU Hasyim Asy’ari menganggap tindakan Gibran tidak patut dilakukan.

KPU akan memberi teguran melalui tim ses Gibran saat rapat evaluasi dan persiapan debat selanjutnya. (*)

Respons Jokowi soal Diklaim Masuk PAN dan Tinggalkan PDIP

Laporan: Hadi

JAKARTA-- Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tentang statusnya sebagai kader.

Sebelumnya, Zulhas menyebut Jokowi sudah menjadi kader PAN dan meninggal-

kan partai lamanya, PDIP. Merespons itu, Jokowi tidak mengiyakan maupun membantah.

“Ini partai PAN ini kan masuk koalisi pemerintah. Jadi, PAN itu masuk ke keluarga kita,” kata Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta, Senin (11/12). Jokowi tak

membenarkan atau membantah langsung kabar itu. Dia hanya kembali membahas hubungan kekeluargaan dengan partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu.

“Kalau kita jadi keluarga PAN, ya sama saja kan? PAN masuk keluarga kita, kita masuk keluarga PAN,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Nasional PAN menyebut Presiden Jokowi sudah berpindah partai. Dia mengklaim kini Jokowi sudah menjadi kader PAN.

“Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN. Sudah enggak yang lama, ribut terus,” kata Zulhas di Manggarai Barat, Sabtu lalu (9/12) seperti diberitakan detik.com.

Zulhas mengatakan bahwa PAN adalah partai yang riang gembira. Ada partai lain yang suka marah. Namun, Zulhas menekankan bahwa PAN tidak seperti itu. Selang sehari

setelahnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi klaim Zulhas tersebut. Dia hanya menjawab singkat.

“Ya nanti Pak Zul akan menunjukkan KTA-nya,” kata Hasto di Serang, Banten.

Hasto mengatakan pernyataan Zulhas itu sekaligus mem-

bantu pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Namun, dia tidak merinci maksudnya.

“Secara tidak langsung merupakan cara Pak Zulkifli Hasan membantu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD,” katanya. (*)



PRESIDEN Jokowi tidak membantah maupun mengiyakan soal dirinya bergabung menjadi kader PAN

Asrun Lio Secara Resmi Buka Soft Opening Pelayanan Poli Rawat Jalan RSJPDO

Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra), Drs. H. Asrun Lio, M. Hum., Ph.D, membuka secara resmi Soft Opening, Pelayanan Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yii Koo (RSJPDO) Prov. Sultra bertempat di Loby RSJPDO, (Selasa, 12 Desember 2023)

Hadir dalam kegiatan Soft Opening tersebut, Plt. Direktur RSJPDO dan Direksi RSJPDO, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov. Sultra, Para Dokter Spesialis, Dokter Sub-spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi spesialis, Dokter Gigi non spesialis dan seluruh civitas RSJPDO dan Pejabat terkait

Sambutan, Plt. Direktur RSJPDO, dr. H. Algazali Amirullah, M.Kes, kami melaporkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024, kami akan membuka layanan poli klinik sesuai dengan arahan Sekda Sultra, serta dari Kementerian Kesehatan kami RSJPDO harus buka dan mudah-mudahan kalau tidak ada arah melintang kami akan membenah dan bulan Maret atau Bulan Februari kami akan melakukan Grand Opening

Dan nanti dimohon arahan dari Sekda Sultra nanti Bapak Pj. Gubernur mengarahkan kepada kami pada saat Grand Opening bisa menghadirkan Menteri Kesehatan atau Bahkan RI 1 sekalipun

Sehingga kami lakukan sekarang yaitu poliklinik jantung, poli saraf, beda syarat, gizi klinik, medical check up dan dokter umum, kami sadar keterlambatan karna kesiapan obat-obatan dan alat-alat BHP kami terlambat membukanya.

Serta alat-alat yang kami nanti, grand opening bahwa alat canggih dapat berop-



erasi, dimulai dari IGD sudah ada alat yang bisa dioperasikan dan mudah-mudahan pada saat Grand Opening benar-benar terealisasi dengan baik

Walaupun usia kami 1 tahun lebih, kami dalam berbagai kegiatan diluar sehingga cukup membuat nama RSJPDO mendapatkan peringkat terbaik pertama dari Komisi Informasi Prov.Sultra Yang ada di lingkungan OPD

Harapan kami RSJPDO ini, menjadi kawasan Timur Indonesia sebagai rujukan sebagai Rumah Sakit Timur sebagaimana regresif oleh Bapak Gubernur H. Ali Mazi dan Bapak H. Lukman Abunawas selaku Wakil Gubernur Sultra

Sambutan Sekda Sultra, sekaligus meresmikan pembukaan Poli Rawat Jalan RSJPDO dalam rangka Soft Opening bahwa peresmian ini penuh dengan harapan dapat memberikan pelayanan terbaik, perasaan ini sudah beberapa kali diresmikan ini ada peresmian yang belum ditandai dengan penandatanganan prasasti Bapak Gubernur dan Wakil pada periode 2018-2023 pada masanya memang ini dinanti oleh masyarakat kalau di Jakarta ada Rumah Sakit Harapan kita kalau RS Harapan Sultra yaitu RSJPDO

Kita lihat Fasilitas ini merupakan fasilitas yang termegah dan termegah ini merupakan rumah sakit yang berkelas RS Jantung tipe B, ini saya kira konstruksinya tipe A sehingga manajemennya tipe A sehingga nantinya akan bertahap, di eval-

uasi dan mendapat predikat yang kita harapkan lebih baik lagi RS dengan tipe A

Laporan berkala secara terus-menerus kami laporkan dari Kementerian Kesehatan dan respon yang sangat baik terhadap RSJPDO sangat luar biasa, itu dibuktikan dengan kucuran dana diberikan terdapat pembangunan Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yii Koo kepada mereka yang telah berjasa dalam menyiapkan dokumen, bernegosiasi, menyakinkan pusat dan daerah tentu sangat luar biasa dan mungkin hadir disini dr.sjarif Subijakto sebagai Dokter Spesialis saya atas pribadi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan terima kasih tanpa beliau ini tidak akan mendapatkan pengakuan secara kelembagaan dan di masyarakat sehingga diharapkan bisa menjadi RS internasional karna itu dilihat kemajuan dalam pembangunan

Dalam sisi peralatan tidak terjadi masalah, alat kesehatan sekarang di prioritaskan oleh Kementerian Kesehatan khususnya rumah ini, silahkan Direktur dan bersama Tim mengidentifikasi kembali alat-alat kesehatan dan tentu bisa diajukan di Kementerian yang dapat diberikan bantuan pola yang berbeda khususnya alatnya sudah mengalami perubahan sehingga alatnya dipersiapkan dari sana untuk disiapkan untuk kebutuhan kita

Secara bertahap RS ini alat-alat dapat di fungsikan dan di operasionalkan sehingga

ga hari ini dilakukan Soft Opening pemberian pelayanan rawat jalan sambil jalan RS ini bisa di rawat dan ada tenaga-tenaga yang telah ditempatkan disini, sudah ada tenaga medis, tenaga resepsionis, tenaga-tenaga pendukung yang ada di RS supaya bisa berfungsi dengan baik, maka kita awali dengan rawat jalan ini

Pada hari-hari, bulan dan tahun kedepan tahun 2024 tidak lama lagi kita akan berahli tahun. Oleh karna itu, 2023 kita akhiri dengan resolusi yang terbaik, segmen-segmen terbaik dari RS Jantung dan Selamat juga mendapat predikat terbaik untuk kategori pelayanan

Dilanjutkan dengan sesi pemotongan tumpeng oleh Sekda Sultra, didampingi Plt. Direktur RSJPDO dan Ketua Komite Medik atau perwakilan Dokter Spesialis, dalam rangka Soft Opening, Pelayanan Poli Rawat Jalan RSJPDO sehingga secara resmi dibuka layanan rawat jalan RSJPDO

Dan terakhir Sekda Sultra mengunjungi ruang pelayanan mulai dari UGD, Ruang Operasi, Ruang Tindakan Operasi dan ruang lainnya, mulai dari lantai 2,3 dan 1 didampingi Plt. Direktur RSJPDO, Kepala OPD Lingkup. Pemrov. Sultra, Dokter Spesialis dan Pejabat terkait. Tutupnya. (*)

Sekda Sultra Buka Acara Puncak HUT ke 24 DWP dan Juara Umum BPSDM Prov Sultra

Pewarta: Lisna

KENDARI- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, membuka acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tahun 2023 dan Peringatan Hari Ibu Ke- 95, bertempat di Hotel Claro Kendari, Selasa, 12 Desember 2023.

Hadir dalam acara tersebut Forkopimda Sultra, Anggota DPR RI Komisi X Tina Nur Alam, Sekretaris Jendral Dharma Wanita Persatuan Pusat Dewi Arif R Hakim dan Juwariyah Ma'uf Cahyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Prov. Sultra, Ketua DWP Sultra terdahulu, Ketua Organisasi Wanita dan Para Ketua DWP Kab/Kota Se-Sultra serta Pejabat terkait.

Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia oleh Ibu Irma Selistia M. Rusdin Jaya menyampaikan bahwa Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-24 tahun ini, untuk dapat memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan terhadap Dharma Wanita Persatuan ke-24 tahun 2023 sebagai wujud dukungan organisasi mitra pemerintah pada semua tingkat.

Dharma Wanita Persatuan adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional.

Tujuan organisasi DWP adalah terwujudnya kesejahteraan anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional.

Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain:

Pertama meningkatkan kesadaran tentang peran strategis yang dimiliki perempuan Khususnya anggota Darma Wanita Persatuan,

Kedua mengoptimalkan peran yang dapat dilakukan oleh perempuan untuk menunjang berbagai pilar-pilar tujuan Pembangunan berkelanjutan Khususnya, yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi, sosial budaya dan ling-

kungan,

Ketiga meningkatkan silaturahmi antar anggota dan pengurus DWP di seluruh Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara.

Adapun tema HUT DWP kali ini "Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan." ungkapnya

Dalam sambutannya Ketua DWP Provinsi Sultra Wa Ode Munah Asrun Lio mengatakan bahwa peran serta perempuan dalam pembangunan sangat penting dan turut menentukan berhasilnya pembangunan. Perempuan diminta untuk berperan aktif dalam mencapai semua tujuan dan target dalam agenda pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Setiap target dan tujuan dalam agenda tersebut sangat mulia dengan menjunjung tinggi HAM, terutama kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Lebih lanjut disampaikan, betapa pentingnya peran perempuan sebagai pilar pembangunan di Sulawesi Tenggara. Mereka bukan hanya pendukung keluarga para Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun juga memiliki peran vital dalam segala aspek pembangunan daerah. Harapannya, perempuan dalam Dharma Wanita Persatuan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi berharga bagi keluarga, daerah, serta masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Adapun peringatan hari ibu ke-95 yang disampaikan oleh Ketua DWP Sultra bahwa pada hari ulang tahun ke-24 DWP sekaligus peringatan hari ibu ke-95, besar harapan saya agar organisasi ini yang terus menjadi rumah bagi kita semua, sekaligus menjadi pilar penting dalam menguatkan peranan perempuan Indonesia.

Sementara itu, Sambutan Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan peran penting pendidikan dalam keluarga, di mana perempuan menjadi kunci sukses. Pendidikan dianggap sebagai modal utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dan

perempuan memiliki andil besar dalam mewujudkan.

Peringatan DWP ini juga menyoroti betapa pentingnya kerjasama dan dukungan antar perempuan, serta dapat memberikan penghormatan pada suami sebagai bagian dari peran aktif dalam pembangunan daerah dan negara.

Dilanjutkan dengan sesi pemotongan tumpeng oleh Sekda Sultra, didampingi Ketua DWP Prov Sultra dan Sekretaris Jendral DWP serta Anggota DWP Sultra, dalam rangka HUT DWP ke-24 Tahun 2023.

Pengumuman juara lomba dalam rangka HUT ke-24 DWP tahun 2023, kategorinya yaitu Pertama Lomba Fashion Show, Kedua Lomba MC, Ketiga Lomba pangan lokal dan non beras antar DWP Prov. Sultra, Keempat Laporan E-Reporting tingkat DWP OPD Prov. Sultra dan Kab/Kota se-Sultra.

Adapun pemenang lomba untuk kategori lomba pangan lokal, non beras antar DWP Prov. Sultra yakni Juara 1 DWP Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Juara 2 DWP BPKAD, Juara 3 DWP Dinas Ketapang, Harapan 1 DWP Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Harapan 2 DWP RS Umum Daerah Bahteramas, Harapan 3 DWP Sumber Daya Air dan Bina marga dan Juara Favorit DWP Disperindag.

Serta dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba pendataan PAUD Binaan DWP Tingkat Nasional oleh Ketua Umum dalam hal ini Sekretaris Jendral DWP Kepada Ketua DWP Prov. Sultra atas keberhasilan meraih peringkat ke-2 tingkat nasional.

Adapun yang keluar menjadi Juara umum HUT DWP Ke-24 Tahun 2023 yakni BPSDM Prov. Sultra

Sebelumnya, Ketua DWP Prov. Sultra bersama pengurus DWP Provinsi menjemput Sekretaris Jenderal Dharma Wanita Persatuan (Sekjen DWP) ibu Dewi Arif R Hakim dan Ibu DJuwariyah Ma'uf Cahyono dibandara Halu Oleo pada hari Senin, 11 Desember 2023 pada jam 14.00 WIT. (*)

Dinas Pangan Bersama TP-PKK Buteng Tanam dan Bagikan 10.000 Pohon Cabe di Lakapera



Laporan: Ardi

BUTON, BP-Bertempat di Desa Lakapera Kecamatan GU, Sabtu (9/12/2023), Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf melaksanakan kegiatan Lauching dengan menanam dan membagikan 10.000 pohon cabe.

Kegiatan Penanaman dan Pembagian 10.000 pohon cabe diinisiasi oleh Dinas Pangan kerjasama dengan TP-PKK Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu bentuk dan kepedulian pemerintah daerah

dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Buton Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pangan Dan TP- PKK serta masyarakat Desa Lakapera sebagai bentuk sinergi dalam mendorong akselerasi ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah merupakan revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan.

Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf ber-

harap, penanaman dan pembagian 10.000 pohon cabe akan memberikan manfaat ganda yang positif bagi petani setempat, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan pengendalian inflasi dan mendorong produksi pangan di Kabupaten Buton Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Pangan, Ketua dan jajaran pengurus serta anggota TP PKK Buton Tengah, pejabat dan masyarakat Desa Lakapera. (*)

Pj. Bupati Buton serahkan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat Kab.Buton



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton Drs. La Ode Mustari M.Si menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat Kabupaten Buton sekaligus Penyerahan sertifikat tanah PTSL secara serentak se-Provinsi Sulawesi Tenggara melalui media zoom meeting di Aula Kantor Bupati Buton, Selasa 12 Desember 2023.

Turut hadir Anggota Forkopimda Kabupaten Buton, Kapolres Buton, Perwakilan Kajari Buton, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton, dan masyarakat penerima sertifikat tanah.

Dalam laporannya Kepala Kantor Pertanahan, Yusuf S.Si menyampaikan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Pertanahan Kabupaten Buton Telah dilaksanakan di 27 desa/kelurahan dengan target PTSP sebanyak 4.693 bidang dan retribusi tanah sebanyak 1000

bidang dan secara keseluruhan sebanyak 5.693 bidang dan telah selesai 100 persen.

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari M.Si mengatakan dengan adanya penyerahan kegiatan penyerahan sertifikat tanah ini, kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat menjadi jelas sehingga sertifikat ini menjadi sangat penting.

“Dengan meningkatkannya kebutuhan dan nilai tanah menjadi salah satu penyebab tingginya angka konflik dan kasus Pertanahan. Olehnya itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah serta Kantor Pertanahan berkomitmen untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui program strategis nasional dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki masyarakat.

Pj. Bupati Buton mengapresiasi jajaran Kantor Pertanahan Kabu-

paten Buton karena di tahun 2023 telah menyelesaikan program strategis nasional antara lain PTSL sebanyak 4.693 sertifikat dan redistribusi tanah sebanyak 1.000 sertifikat serta telah menyelesaikan sertifikat tanah aset pemerintah kabupaten Buton sejumlah 51 sertifikat.

“Keberhasilan ini berkat koordinasi, kolaborasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah Kabupaten Buton dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton. Kami berharap kerjasama dan kolaborasi ini terus dapat ditingkatkan di masa depan dan mendukung upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Buton untuk mensertifikatkan seluruh bidang tanah yang ada di Kabupaten Buton,” katanya.

Sekwan DPRD Sultra ini berharap dengan adanya legalitas atas kepemilikan tanah ini agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Buton.

Dekranasda Buton Selatan Raih Juara Terbaik II dalam Sultra Tenun Karnaval 2023



Laporan : Eron

KENDARI, BP-Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, secara resmi membuka kegiatan Sultra Tenun Karnaval Tahun 2023 dengan mengusung tema “Legenda Sultra” yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Prov. Sultra bertempat di Depan Kantor Walikota Kendari, Sabtu, 02 Desember 2023.

Hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Sultra, Plh. Sekda Sultra, Ketua TP PKK Prov. Sultra selaku Ketua DWPProv. Sultra dan Ketua Dekranasda Sultra, Para Asisten, Para Kepala OPD Lingkup Prov. Sultra, Para Bupati/Walikota se-Sultra beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota se-Sultra, Pimpinan Kepala OPD Kab/Kota se-Sultra, Para Ketua DWP Lingkup Pemprov. Sultra, Ketua Dekranasda Kab/Kota se-Sultra yang mengikuti Tenun Karnaval, serta para pelaku usaha tenun ekonomi kreatif, Kria se-Sultra, Asosiasi Karnaval Indonesia Sultra, pejabat terkait dan disaksikan oleh masyarakat yang datang untuk menyaksikan acara tersebut

Sambutan Kepala Dinas Pariwisata Sultra, H. Belli, SE., M.Si, bahwa untuk menghadiri pembukaan event Sultra tenun karnaval dari Sultra untuk Indonesia bergulir dalam

rangka peringatan Hari Tenun Nasional (HTN) yang diselenggarakan selama 2 hari mulai Sabtu (2/12/2023) hingga Minggu (3/12/2023). Acara Karnaval tahun 2023 ini mengusung tema “Tenun Sultra, Dari Sultra Untuk Indonesia”, merupakan penyelenggaraan yang ke-7 kali, yang pertama kali diselenggarakan tahun 2015 dimana saat itu, Sultra Tenun Karnaval merupakan salah satu set event perayaan Halo Sultra yaitu event perayaan hari ulang tahun Prov. Sultra yang diperingati setiap tanggal 27 April.

Acaraini sangat spektakuler, memamerkan parade busana tenunan setiap daerah di Sultra. Tidak tanggung-tanggung, menghadirkan 17 Kabupaten/Kota Ketua Dekranasda, atau pun perwakilan masing-masing daerah tampil mengenakan busana adat tenun dengan begitu elegan dalam parade budaya pembukaan Sultra Tenun Karnaval (STK).

Sejak tahun 2015, Sultra Tenun Karnaval secara rutin dilaksanakan sampai saat ini, kecuali tahun 2020-2021 dikarenakan dunia mengalami pandemi covid-19. Namun setelah pandemi covid-19 merendah tahun 2022 event ini kami laksanakan kembali dan menjadi tuan rumah adalah Kota Bau-Bau dan yang diselenggarakan secara mandiri mengingat potensi event ini untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara yang sangatlah besar dan mendorong pelestarian tenunan Sulawesi Tenggara sebagai bagian kampanye kita untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia sebagaimana amanat Presiden dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2022.

Dekranasda Kabupaten Buton Selatan turut dalam kegiatan Sultra Tenun Karnaval 2023 ini, dan masyarakat Buton Selatan sangat bangga berhasil

meraih Juara Terbaik II dalam Lomba Fashion Show Sultra Tenun Karnaval 2023. Tepuk tangan bergemuruh serta yel-yel ribuan penonton saat penampilan Ny. Yuniar Budiman, SKM., M.Si Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Selatan, dengan menampilkan kostum tenunan adat motif Buton Selatan sehingga tim penilai lomba memberikan nilai yang representatif.

“Sultra Tenun Karnaval” kali ini, untuk pertama kalinya diselenggarakan pada malam hari dengan harapan bisa meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan event sekaligus menarik wisatawan untuk kembali hadir di event selanjutnya.

Melalui ajang “Sultra Tenun Karnaval 2023” pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen untuk terus mengembangkan dan melestarikan kerajinan tenun yang ada di Buton Selatan, semoga event tahunan ini juga menjadi potensi kekuatan ekonomi kreatif. Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Selatan Ny. Yuniar Budiman SKM., M.Si, mengajak masyarakat terkhusus para generasi muda wajib melestarikan dan memperjuangkan tenun tradisional Buton Selatan sebagai warisan budaya. (*)

Dr Muh Rasman Apresiasi Peserta LKBB Berhasil Harumkan Baubau di Tingkat Nasional



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si menyambut gembira peserta Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) tingkat nasional tahun 2023 yang berlaga di Sukabumi Jawa Barat dan telah berhasil membawa nama harum Baubau di tingkat nasional. Hal ini diungkapkannya saat menerima peserta Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) tingkat nasional 2023 mewakili Kota Baubau di rujab Wali Kota Baubau Senin malam

(11/12/2023).

Orang nomor satu di Kota Baubau ini merasa senang bila memang ada yang mendorong lomba LKBB ditingkatkan menjadi salah satu cabang olahraga. Apalagi itu memungkinkan lewat dana BOS. “Kalau sudah ada cabang olahraganya bicara dengan KONI nanti ketemu di kantor Wali Kota kita bicarakan. Terus ada juga OPD yang menangani sehingga itu terus dibicarakan dan dilaksanakan lombanya. Mengenai pembiayaan saya kira kalau bersama-sama pasti ada

solusinya.”ujarnya. Ditambahkan, baris berbaris itu harus ditularkan dan dikembangkan kepada seluruh anak sekolah yang ada di Kota Baubau karena baris berbaris suatu latihan awal untuk membimbing kerja sama tim dan kedisiplinan. Sehingga kalau menuju satu arah ini bagus pula untuk melatih mental dan kerja sama tim generasi Baubau.” Ayo silahkan rencanakan lomba baris berbaris berbicara dengan OPD yang menangani kalau memang tidak pede tingkat Provinsi kita bikin dulu

Wali Kota Cup. Intinya kita ingin membesarkan melatih generasi penerus,”ungkapnya. Orang nomor satu di Kota Baubau ini mengharapkan kepada seluruh peserta LKBB tingkat nasional dari Kota Baubau untuk menyiapkan diri tampil dihadapan para pejabat Pemkot seperti pada kegiatan apel ASN Pemkot Baubau yang selalu dilaksanakan pada setiap hari Senin. Sehingga seluruh pejabat dapat melihat ternyata ada potensi generasi Baubau yang bisa mengharumkan nama Baubau di tingkat nasional.(*)

Pj Bupati Buton Tengah Membuka Perkemahan Akbar Satuan Pramuka Siaga dan Penggalang 2023

Laporan: Ardi

BUTENG, BP-Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf selaku ketua majelis pembimbing gerakan Pramuka Kwartir Cabang Buton Tengah, membuka secara resmi perkemahan akbar satuan pramuka Siaga dan Penggalang, di lapangan SMP Negeri 1 Mawasangka Kelurahan Mawasangka, Min-

ggu (10/12/2023). Dalam arahannya, Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf mengatakan, atas nama pribadi sekaligus sebagai ketua majelis pembimbing gerakan Pramuka Kwartir Cabang Buton Tengah, menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan perkemahan akbar satuan pramuka siaga dan penggalang, seb-

agai wujud nyata revitalisasi gerakan pramuka di kwartir ranting mawasangka. “Melalui kegiatan ini, adik-adik akan menerima banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Baik wawasan, kedisiplinan, ketangkasan dan keterampilan”,ungkapnya. Manfaatkan ini sebagai bekal pengetahuan, bekal pengalaman yang akan membantu proses pembentukan mental karakter adik-adikku semua agar menjadi pribadi yang cakap, mandiri dan bermanfaat bagi lingkungan, baik lingkun-

gan bermain, lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. “Saya berharap agar kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan, atau sustainability, berdaya dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak kita di masa mendatang. Apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengurus kwartir ranting mawasangka dan seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kepada



semua pihak yang telah membantu menumbuhkan, mengembangkan, dan memajukan ger-

akan pramuka di Kabupaten Buton Tengah. Saya meyakini bahwa, gerakan pramuka di

kwartir ranting mawasangka akan dapat terus eksis, maju dan

Pemkab Buton tekan Stunting dengan Konsumsi Pangan Berbasis B2SA

Laporan: Rahman

BUTON, BP-Salah satu masalah kekurangan gizi yang saat ini menjadi perhatian pemerintah adalah stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Hal itu dikatakan Pj Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSI dalam Forum Sosialisasi Konsumsi Pangan Berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) tingkat Kabupaten Buton yang digelar Pemkab Buton melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula SMKN 2 Pasarwajo, Rabu 13 Desember 2023.

Lebih lanjut Kepala Daerah di Bumi Penghasil Alam Terbesar di dunia ini mengatakan bahwa konsumsi pangan berkualitas dapat diwujudkan apabila pola konsumsi makanan sehari-hari. Tindakan nyata itu dilakukan secara tepat, mengandung zat gizi lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan berdasarkan cita rasa, daya cerna dan kemampuan daya beli masyarakat sehingga konsumsi pangan yang berkualitas diharapkan dapat mengatasi permasalahan gizi ganda yaitu kekurangan dan kelebihan gizi. “Salah satu upaya untuk mensosialisasikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal,” katanya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton, Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Para Pejabat Eselon II Lingkup Pemkab Buton, Kabid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra Para Camat Sekabupaten Buton, Para Kepala Desa/Lurah Sekabupaten Buton, Para ibu PKK Sekabupaten Buton.

Dalam laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra yang diwakili Kabid Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra ibu Rosmini, S.Tp.M.S menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mengonsumsi pangan yang berbasis B2SA.

Ia menyampaikan bahwa pola konsumsi pangan berbasis B2SA sampai saat ini belum tercapai, karena secara nasional sudah mencapai 92%, namun untuk provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 80,1% dan untuk Kabupaten Buton baru mencapai 78% dari target ideal 100%.

Olehnya itu perlu adanya sosialisasi ini secara terus menerus agar

pola konsumsi pangan berbasis B2SA dalam rangka untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif.

“Sasaran dalam kegiatan ini adalah PKK karena PKK merupakan ujung tombak sebagai perpanjangan tangan sampai ke meja makan Masyarakat,” katanya.

Maka perlu dilaksanakan melalui demonstrasi memasak menu B2SA dan lomba cipta menu secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Sekarang ini kata Kabid untuk terus memanfaatkan kemandirian pangan lokal dan pelestarian sumber daya alam, dengan memanfaatkan hasil potensi alam daerah misalnya singkong, jagung, ubi, jalar, pisang, sagu, sukun, dan lain-lain yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Untuk memotivasi masyarakat agar mau mengonsumsi makanan sesuai pola pangan harapan maka secara khusus kami harapkan kepada tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Organisasi dharma wanita yang ada untuk dapat memasyarakatkan betapa pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang mengatamakan sumber daya pangan lokal kepada seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga,” katanya.(*)

Kejari Baubau Gelar Apel Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023, Raja Sakti: Ingat Bahwa yang Kita Tangani Adalah Kejahatan Keraf Putih

Pewartanya: Alyakin

BAUBAU, BP - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Baubau, Raja Sakti Harahap SH memimpin apel peringatan anti korupsi sedunia tahun (Harkodia) 2023. Upacara yang diselenggarakan di halaman Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau berlangsung khidmat, Senin (11/12/2023).

Peringatan hari anti korupsi sedunia tahun ini mengangkat tema “Maju Membangun Negeri, Tanpa Korupsi”, tema tersebut memiliki filosofi mendalam sebagai pelecute bagi setiap elemen masyarakat serta aparat penegak hukum. Hal itu diartikan, agar aparat penegak hukum senantiasa bahu membahu, bersinergi, dengan semangat serta daya juang yang sama dalam memerangi kejahatan rasuah di Indonesia.

“Tema yang diangkat merupakan bentuk refleksi pola pikir serta pola tindak progresif dari setiap aparat penegak hukum, khususnya jajaran tindak pidana khusus untuk terus menyempurnakan pelaksanaan tugas penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di seluruh penjuru negeri demi kemajuan pembangunan negeri.” kata Kajari Baubau, Raja Sakti Harahap saat membacakan sambutan jaksa agung RI.

Kata dia, semangat untuk menjadikan gerakan bangsa anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari basa basi belaka, namun berasal dari alasan mendasar, sebab terdapat situasi yang memprihatinkan dari negara-negara di dunia, karena masifnya perilaku koruptif yang terjadi.

“Sebagai pengingat bahwa tepat 20 tahun lalu, sekretaris jenderal PBB Kofi Annan secara terang terangan menyampaikan dihadapan 191 anggota mejelis umum PBB bahwa praktik korupsi benar-benar melukai perasaan kaum miskin, serta korupsi telah menjadi batu sandungan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pembangunan di setiap

negara.” katanya.

Pernyataan tersebut bukanlah sebuah isapan jempol. Kata dia, berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), 2022 lalu, total potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, ada pada kisaran Rp 42,747 triliun.

“Fakta empiris tersebut membuktikan, bahwa berbagai perkara tindak pidana korupsi di Indonesia telah membahayakan stabilitas pembangunan sosial, perekonomian negara, dan juga politik negara. Dengan kata lain, korupsi merupakan ancaman bagi bangsa, dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.” katanya.

Situasi tersebut diharapkan menjadi cambuk bagi setiap elemen bangsa untuk menyadari karena korupsi di negeri ini secara nyata telah menggerogoti pilar-pilar bangsa, bahkan dapat dikatakan tiada lagi aspek kehidupan di tanah air yang tidak membusuk akibat perilaku koruptif.

Mendasari hal tersebut, lanjut dia, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai garda terdepan yang memiliki peran penting, dan vital dalam penegakkan hukum, harus mampu menangkap dan harapan masyarakat, yang mendambakan pemerintahan yang bersih.

Hal tersebut dapat dicapai melalui upaya tidak berkesudahan, untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas penanganan perkara, dengan bertindak secara profesional dan proporsional serta selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, momentum peringatan hari anti korupsi seyogyanya menjadi stimulus komitmen kejaksaan untuk terus berikhtiar mencegah dan memerangi korupsi di level manapun.

Tindak pidana korupsi lahir dan berkembang dari kekuasaan negara yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab dan seimbang, sehingga menjadi sangat logis, bahwa praktik korupsi nyaris memasuki setiap lini kehidupan

dan selalu terjadi repetisi, meskipun telah dilakukan pemberantasan tanpa henti.

“Sebagai upaya bersama dalam memerangi dan memberantas praktik kejahatan rasuah yang kian berkembang. Pemerintah bersama dengan legislator telah bersinergi memberikan penguatan kelembagaan kepada kita dengan diundangkannya undang-undang Kejaksaan terbaru, serta saat ini, sedang berjalan upaya peningkatan status pusat pemulihan aset menjadi badan pemulihan aset.” katanya.

Melalui penguatan penguatan tersebut, sehingga ia yakin dan percaya institusi Kejaksaan mampu menjadi pionir diantara aparat penegak hukum lainnya. Untuk senantiasa proaktif, responsif dalam memastikan berbagai upaya yang terukur, cerdas, berkualitas, berintegritas, tuntas serta dapat mengakselerasi kerja-pengawasan dan pemberantasan korupsi, guna menekan laju praktik koruptif, serta meminimalisir dampak merugikan dan merusak yang ditimbulkan.

“Luasnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga kejaksaan ini, tentu saja menuntut kesiapan dan kesiapan dari segenap aparat kejaksaan untuk mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembannya secara profesional. Bila melihat pada kenyataan yang ada, maka dapat dipastikan bahwa tugas maupun tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa, kedepan akan jauh semakin berat

seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara Tindak Pidana Korupsi, menuntut profesionalitas jaksa sebagai faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.” sambungan Kajari Baubau.

Selain profesional serta kapasitas diri, ia menegaskan, jaksa merupakan unsur dari sistem peradilan pidana (Criminal Justice System-Red), sebagai satu kesatuan jaringan (Network-Red)

Kantor Hukum Mawan SH dan Rekan Lawfirman Resmi Laporkan 10 Kepala Puskesmas dan Kepala RSUD Buton Utara atas Kasus Dugaan SK Bodong ke Ombusman RI

Pewartanya: Kasrun

BURANGA, BP - Kantor Mawan SH rekan Lawfirman resmi melaporkan kasus dugaan Surat Keputusan (SK) Bodong yang dibuat oleh beberapa oknum Kepala Puskesmas (Kapus) dan Kepala Rumah Sakit Daerah Buton Utara di Ombudsman RI Sulawesi Tenggara pada 30 November 2023 lalu.

Menurut Mawan, beberapa oknum Kapus telah membuatkan SK untuk memuluskan beberapa peserta agar bisa mengikuti tes PPPK 2023 jalur khusus. Padahal mereka belum lama magang atau tidak magang di Puskesmas tersebut.

“Pada tanggal 30 November 2023, kantor hukum Mawan S.H dan Rekan Lawfirman melaporkan kasus dugaan SK BODONG di kantor Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sultra dan diterima langsung oleh asisten Ombudsman ibu Aulia”, ungkap Mawan, Senin malam (11/12/2023).

Mawan mengatakan, telah melakukan konfirmasi kepada asisten pemeriksa Ombuds-

peradilan, sehingga diperlukan adanya sinkronisasi, guna memastikan terciptanya kesamaan persepsi antara subsistem lainnya, dalam menangani suatu perkara. Koordinasi, kerjasama dan komunikasi menjadi suatu kewajiban yang pelaksanaannya harus di landasi keterbukaan, kebersamaan dan berkesinambungan antar penegak hukum.

“Saya tegaskan bahwa penegak hukum yang dilakukan secara sistemik, holistik dan integratif sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana kolaborasi, sinergi dan keterpaduan antara proses pencegahan dan penindakan sebagai bagian dari mata rantai yang tidak terpisahkan, tidak saling meniadakan dan saling melengkapi.” katanya.



La Ode Harmawan SH

man RI Sultra untuk menanyakan perkembangan aduannya.

“Pak Aan Andrian mengatakan bahwa akan secepatnya melakukan langkah-langkah terkait kasus dugaan SK bodong di kabupaten Buton Utara dengan turun langsung ke kabupaten buton utara”, ujarnya.

Minggu ini kata Mawan Ombudsman akan melakukan langkah-langkah pemanggilan terhadap terlapor dalam hal ini nama-nama yang terduga pembuat SK bodong atau dengan membatalkan/memberikan

rekomenadasi ke pihak aparat penegak hukum.

“karena sudah masuk ranah pemalsuan dokumen dan bisa-bisa pelaku di tahan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini pasal 263 KUHP dengan ancaman pidananya 6 tahun penjara”, tambahnya.

Kata Mawan, dalam kasus SK palsu ini pihak BKPSDM kabupaten Buton Utara bisa kena karena meloloskan secara administrasi yang nyata-nyata orang tersebut tidak pernah magang alias

honor.

“Dan terlebih lagi direktur RSUD dan 10 kepala puskesmas di kabupaten Buton Utara bisa kena juga karena ada beberapa oknum yang SK bodong nya di tanda tangani oleh kepala Puskesmas, saya katakan bahwa kasus ini akan berjamaah”, tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan kami belum bisa menghubungi beberapa oknum Kapus dan Kepala RSUD Buton Utara untuk dimintai tanggapannya. (*)

penting baginya untuk mengingatkan kembali, senantiasa memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan untuk di aplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga pada gilirannya akan menciptakan citra diri positif yang diharapkan akan menjadi virus kebaikan untuk menyebarkan tumbuh kembangnya budaya dan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sekaligus menjadi ancaman dan mempersempit ruang gerak bagi siapapun yang ingin melakukan praktik korupsi.

“Saya ingin kejaksaan hadir di masyarakat sebagai teladan serta figur yang memiliki konsistensi serta integritas yang mumpuni dalam proses pemberantasan korupsi,” harapnya.

Dalam kesempatan

tan ini, Kajari Baubau menyampaikan pesan Jaksa agung untuk mengingatkan kepada seluruh jajaran, bahwa menjaga keteguhan integritas dan moral aparat, adalah variabel penting. Serta merupakan modal utama yang diperlukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari anti korupsi sedunia tahun 2023, dengan bimbingan dan petunjuk Allah SWT, Tuhan yang maha bijaksana. Mari kita terus berkarya untuk bangsa dalam memberantas praktik-praktik korupsi di negeri ini. Kita kawal Indonesia sebagai bangsa besar yang terus melangkah menuju masa depan dengan perjuangan di antara berbagai perubahan.” tutupnya. (*)

Asisten II Asmahani: Pelayanan Publik Harus Melayani dan Memuaskan Masyarakat



Pewarta: Ardi

BAUBAU, BP-Paradigma penyelenggaraan pelayanan publik dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik, harus berorientasi melayani masyarakat dan memberi kepuasan kepada masyarakat.

Demikian dikatakan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si melalui Asisten II Setda Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si saat membuka Kegiatan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dengan tema tata cara pengaduan masyarakat Selasa (12/12/2023).

Menurut Asmahani, salah satu mekanisme yang ditempuh adalah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pelayanan, baik dalam pra penyelenggaraan forum komunikasi publik, penyusunan standar pelayanan, ataupun pada saat pemberian pelayanan ataupun pasca pemberian pelayanan, yakni melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan melalui survei kepuasan masyarakat ataupun melalui pengaduan.

Diungkapkan, pelayanan perizinan di Kota Baubau mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja yang ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Ketiga peraturan tersebut merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah. Dalam peraturan ini diatur tentang manajemen pelayanan, dimana Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang meliputi pelaksanaan pengaduan pelayanan, masyarakat, pengelolaan pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam rangka memasyarakatkan implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui tata cara pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Baubau, ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap pentingnya perizinan pada setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat, baik se-

cara perorangan atau badan usaha maupun pengaduan yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan yang ada di DPMPTSP Kota Baubau.

“Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat tidak menjamin telah terpenuhinya semua hak pelaku usaha dan masyarakat sehingga merasa tidak puas. Untuk itu, pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dapat melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang ada di DPMPTSP Kota Baubau yaitu melalui on line maupun off line yang meliputi aplikasi oss, si cantik cloud, website DPMPTSP Kota Baubau, call center, wa, sms, surat, kotak saran dan secara lisan/tatap muka. bentuk layanan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam mengajukan pengaduan terhadap pelayanan perizinan Kota Baubau,”ujarnya.

Sementara itu, Kadis PTSP Suarmawati, S.Si mengakui, latar belakang melaksanakan kegiatan ini berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2019 terkait pelayanan publik, tentu setiap masyarakat di berikan hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Untuk DPMPTSP, karena berkaitan dengan perizinan, maka kewajiban melakukan pelayanan untuk mendapatkan sesuatu yang muktin dibutuhkan baik itu jasa, barang dan administrasi.

Balai Latihan Kerja Baubau Segera Hadir



Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemkot Baubau tidak lagi dibangun. Pemkot Baubau kini tengah merampungkan kegiatan seminar akhir Feasibility Study (FS) untuk Pembangunan BLK Tahun 2023.

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si diwakili Kadis Tenaga Kerja Kota Baubau Mohamat Abduh, ST, M.Si saat membuka seminar akhir Feasibility Study (FS) BLK tahun 2023 mengatakan, salah satu strategi yang perlu ditempuh Pemkot Baubau dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi perkembangan jumlah penduduk, ketenagakerjaan dan investasi di Kota Baubau adalah

mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK).

Langkah ini merupakan terobosan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja di Kota Baubau khususnya dan Provinsi Sulawesi Tenggara umumnya agar mampu beradaptasi, bertahan di tengah perubahan dunia kerja dan mampu menghadapi persaingan lokal, regional maupun global yang semakin ketat.

Diungkapkan, BLK

sebagai salah satu instrumen peningkatan kompetensi tenaga kerja, mempunyai peranan sangat penting dalam mentransformasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Karena itu, untuk menjamin kualitas pelatihan kerja diperlukan

BLK yang memenuhi standar. Salah satu persyaratan pendirian BLK adalah harus memiliki Dokumen FS.

FS adalah dokumen yang memuat kajian dan rekomendasi pendirian BLK dengan mempertimbangkan aspek Ketenagakerjaan, Demografi, Geografi, Hukum, Sosial Budaya, Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Manajemen, dan Pendanaan

“Output yang ingin dicapai dalam kegiatan FS Pembangunan Balai Latihan Kerja adalah tersedianya dokumen sebagai salah satu persyaratan dan pedoman pendirian Balai Latihan Kerja pada tahap selanjutnya,”katanya. (*)

Masyarakat Ngkari-Ngkari Etnis Bali Ritual Tolak Bala Nangkluk Merane

Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Masyarakat Kelurahan Ngkari-Ngkari Kota Baubau yang hampir 100 persen penduduknya berasal dari Bali menyelenggarakan acara adat Nangkluk Merane pada Selasa (12/12/2023) di balai pertemuan Kelurahan Ngkari-Ngkari.

Dalam upacara ritual adat Nangkluk Merane turut dihadiri Camat Bungi Hasrun, S.IP dan Lurah Nkari-Ngkari. Dalam sambutannya Hasrun mengungkapkan, ritual Nangkluk Merane adalah ritual masyarakat etnis Bali yang merupakan keg-



iatan ritual akhir tahun untuk tolak bala dan memohon kesejahteraan dengan tema Implementasi Tri Hita Karana.

Dikatakan, Sebagai Pemerintah Kecamatan Bungi pihaknya menekankan tema Tri Hita Karana agar dapat di praktek-

kan dalam kehidupan sehari-hari. Tri Hita Karana adalah ajaran agama Hindu dalam menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, Manusia dengan sesama serta Manusia dengan alam.

“Keyakinan ini jika dilaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari maka pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak akan menemui tantangan berarti. Seperti dalam hal menjaga kondusifitas sosial menjelang pemilu, perlu implementasi hubungan sesama manusia dalam ajaran tersebut,”katanya. (*)